

Kepala Desa adalah eksekutif atau kepala pemerintahan di desa yang dipilih langsung oleh rakyat atau penduduk desa. Karena itu, pemilihan Kepala Desa dan pemerintahan desa sering disebut sebagai praktek demokrasi asli ala Indonesia. Kepala desa tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, tetapi juga sebagai pimpinan komunitas atau masyarakat yang terikat dengan tradisi atau budaya setempat.

Sebagai kepala pemerintahan dan pimpinan masyarakat, kepala desa identik dengan laki-laki. Sedikit sekali kepala desa berjenis kelamin perempuan di negeri ini. Struktur sosial dan budaya patriarki menjadi hambatan bagi perempuan untuk mengambil peran-peran penting di masyarakat atau wilayah publik, termasuk dipilih menjadi kepala desa.

Sedikit sekali perempuan berhasil menembus tembok penghalang yang dipasang berlapis oleh struktur sosial, budaya, hukum, dan politik dari tingkat terendah hingga yang paling tinggi. Salah satunya adalah ibu Kartini. Perempuan bernama lengkap Kartini Irwani yang lahir di Jakarta 5

Oktober 1969 ini pernah menjabat Kepala Desa Grimax, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2003-2008.

Awalnya, Kartini menjabat sebagai Sekretaris Desa Persiapan Desa Dasan Tereng dan Desa Grimax. Setelah Desa Grimax menjadi desa definitif, atas dukungan empat kepala dusun (kadus) dari enam kadus yang ada, maka Kartini memutuskan mencalonkan diri menjadi kepala desa.

Kartini harus bertarung melawan dua calon kepala desa laki-laki—Mahrup dan Hapali. Namun, Kartini berhasil memenangkan pemilihan Kepala Desa Grimax dengan perolehan suara cukup signifikan. Selisih suara yang diraih Kartini dengan peraih suara terbanyak kedua sebanyak 200 suara. Menurut ibu dari Nata, Rana, dan None ini, suara terbesar pendukungnya adalah perempuan.

Selama kurang-lebih lima tahun memimpin Desa Grimax, prestasinya cukup membanggakan. Kartini berhasil mendapatkan Program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Desa Grimax bersaing ketat dengan 15 desa lainnya untuk mendapatkan program tersebut melalui seleksi proposal yang ketat. Akhirnya Desa Grimax

Sosok **Kartini**

Dari Kepala Desa ke Parlemen

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
& **NURJANAH**



bersama empat desa lainnya berhasil mendapatkan program PNPB.

Peduli Pendidikan Anak Jalanan

Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai kepala desa, Kartini bersama suaminya Lalu Nurtat, mendirikan yayasan yang diberi nama Yayasan Hadi Sakti. Fokus awal Yayasan Hadi Sakti adalah sebagai tempat penitipan anak dan Rumah Singgah untuk anak jalanan. Melihat kondisi anak-anak yang bekerja sebagai pemulung dan pengangkut barang di pasar dekat rumahnya yang tidak bersekolah atau berhenti dari bangku sekolah, akhirnya fokus yayasan diperluas lagi dengan mengembangkan pendidikan bagi anak-anak marjinal.

Atas dukungan Kedutaan Besar Jerman, Yayasan Hadi Sakti yang dikelola Kartini dan suaminya mulai menjangkau pendidikan bagi anak-anak melalui Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD). Saat ini (tahun 2015) jumlah anak yang ditampung pada pendidikan tingkat SD sebanyak 190 anak dan telah menamatkan satu angkatan. Sedangkan anak-anak yang menjadi murid di TK sebanyak 40 anak.

Sarjana pendidikan lulusan Universitas Mataram (UNRAM) Mataram ini, benar-benar seorang pendidik. Yayasan Hadi Sakti yang didirikannya tidak hanya berhenti pada pendidikan anak, tetapi juga mulai merambah ibu rumah tangga dan remaja putus sekolah. Yayasan Hadi Sakti melaksanakan kursus menjahit, kecantikan, dan pertukangan. Menurut Kartini, kursus-kursus ini diadakan untuk memberikan pendidikan dan ketrampilan kepada ibu-ibu dan remaja putus sekolah, sehingga dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Menuju Parlemen

Tahun 2014, Kartini dipinang oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk bergabung di partai tersebut dan menjadi calon legislatif (caleg). Berbekal pengalamannya sebagai mantan kepala desa selama lima tahun dan aktivitas sosialnya, alumni SDN 01 Sakra dan SMPN 01 Sakra, Lombok Timur ini, berhasil menembus kursi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Mataram pada pemilihan umum (pemilu) legislatif tahun 2014 lalu.

Kartini adalah satu dari lima anggota parlemen perempuan (APP) di DPRD Kota Mataram periode 2014-2019. Keberaniannya merintis karir sebagai politisi di parlemen, selain didukung oleh keluarga, keinginannya untuk memperjuangkan kaum

perempuan dan kaum miskin menjadi faktor yang mendorong Kartini memasuki dunia yang selama ini dikenal sebagai arena laki-laki.

Alumni SMAN Selong, Lombok Timur ini meraih suara sebanyak 1.390 suara dan merupakan suara terbanyak untuk daerah pemilihan (dapil) yang terdiri dari enam kursi. Kartini berhadapan dengan politisi senior yang merupakan caleg *incumbent* dan politik uang (*money politics*) yang sangat kuat dan terang-terangan. Namun investasi sosial yang ditanam Kartini dan pengalamannya sebagai kepala desa selama lima tahun menjadi keunggulannya dalam meraup suara.

Di DPRD Mataram, Kartini berada di Komisi I dan anggota Badan Anggaran. Dengan posisinya tersebut, dia akan berusaha mendorong kebijakan penganggaran yang diperuntukan sebagai modal usaha bagi perempuan. Penganggaran untuk peningkatan ketrampilan dan pemberdayaan perempuan. Menurut Kartini, selama ini kebijakan penganggaran tidak menguntungkan perempuan. Perempuan tidak diperhitungkan dalam setiap kebijakan dan penganggaran.

Belum lagi pada banyak pekerjaan, upah yang diterima perempuan lebih rendah dari laki-laki. Padahal tidak sedikit perempuan yang menjadi penopang utama ekonomi dalam keluarga, tidak sekadar hanya membantu ekonomi keluarga. Namun, kebijakan penganggaran tidak pernah diperuntukan untuk perempuan, karena perempuan dianggap selalu membantu. Sebagai contoh, modal usaha selalu diperuntukkan untuk laki-laki, sehingga perempuan tidak mempunyai akses permodalan.

Bagi perempuan berzodiak Libra ini, pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial harus menyusun perencanaan yang memihak pada kebutuhan perempuan, yang memang selama ini tertinggal dari laki-laki. Untuk memperkuat perencanaan tersebut diperlukan dukungan peraturan.

Terkait Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) Yayasan BaKTI, Kartini mengatakan bahwa, peningkatan kapasitas DPRD, terutama APP sangat penting. Program MAMPU juga harus disinergikan dengan agenda-ganeda DPRD, seperti reses, sehingga program tersebut dapat membuka jalan dan memberi contoh bagi peningkatan kapasitas anggota parlemen dan lahirnya kebijakan yang memihak pada perempuan dan masyarakat miskin.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Database & Publikasi Media Officer MAMPU-BaKTI dan dihubungi melalui email ghufran@bakti.or.id